

Clash of Civilisations: Hambatan Akses Turki ke Uni Eropa

Faidah Rahim

*Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional
FISIP UPN "Veteran" Jawa Timur*

e-mail: faidahrahim@gmail.com

ABSTRACT

Turkey's accession to European Union has been taking a long time. Turkey had applied for full European Economic Community membership in 1987. In Helsinki Summit 1999, European Union advanced Turkey's status as candidate country. Since then, Turkey keeps on attempting to fulfill the Copenhagen Criteria required to open the accession negotiation. Turkey and European Union finally started the negotiation in 2005. But in the progress, the negotiation process between Turkey and European Union has been very slowly. Turkey is still faced to some problems such as human rights and its conflict with Cyprus. Some state members explicitly show their oppositions to Turkey's full membership. The oppositions are mainly based on the Turkey's cultural, historical, and identity difference as a state with predominantly Muslim. This article is focused on cultural and identity factor to analyse the indication of clash of civilisations in European Union's relation with Turkey. This clash of civilisations will be one of the factors that inhibits Turkey's accession to European Union.

Keywords: Turkey's accession, European Union, Clash of civilisations

Akses Turki ke Uni Eropa telah memakan waktu yang sangat panjang. Permohonan Turki untuk menjadi anggota penuh European Economic Community telah diajukan pada 1987. Pada Helsinki Summit 1999, Uni Eropa meningkatkan status Turki menjadi negara kandidat. Sejak itu, Turki terus berupaya melakukan reformasi untuk memenuhi Kriteria Kopenhagen yang dibutuhkan untuk membuka negosiasi akses. Turki dan Uni Eropa akhirnya memulai negosiasi pada tahun 2005. Tetapi dalam perkembangannya, proses negosiasi Turki dan Uni Eropa berjalan sangat lambat. Turki masih dihadap oleh sejumlah persoalan diantaranya masalah hak asasi manusia dan konflik dengan Siprus. Selain itu sejumlah negara anggota Uni Eropa secara eksplisit juga menunjukkan sikap oposisinya terhadap keanggotaan penuh Turki. Sikap oposisi tersebut sebagian besar didasarkan pada perbedaan kultur, sejarah dan identitas Turki sebagai negara mayoritas muslim. Tulisan ini memfokuskan pada faktor kultur dan identitas untuk menganalisa indikasi terjadinya clash of civilisations di dalam hubungan Turki dan Uni Eropa. Clash of civilization ini menjadi salah satu faktor yang menghambat proses akses Turki ke Uni Eropa.

Kata-Kata Kunci: Akses Turki, Uni Eropa, Clash of Civilisations

Sejak tahun 1963, Turki telah memulai keterlibatannya di dalam integrasi regional Eropa dengan menjalin kesepakatan asosiasi dengan *European Economic Community* (EEC). Turki secara resmi mengajukan permohonan keanggotaan penuh di EEC pada tahun 1987. Pada *Helsinki Summit* 1999, Uni Eropa meningkatkan status keanggotaan Turki menjadi negara kandidat. Sebelum diterima menjadi anggota penuh, Turki harus

terlebih dahulu melakukan proses negosiasi aksesi dengan Uni Eropa. Namun sebelumnya, Turki harus dapat memenuhi kriteria politik Kopenhagen yang diperlukan untuk memulai negosiasi.

Sejak tahun 1999, Turki terus berupaya melakukan reformasi untuk dapat memenuhi kriteria politik Kopenhagen. *Copenhagen Summit* pada Desember 2002 menyimpulkan bahwa “Dewan Eropa, berdasarkan laporan dan rekomendasi dari Komisi, memutuskan apabila Turki memenuhi kriteria politik Kopenhagen, maka Uni Eropa akan membuka negosiasi tanpa penundaan” (Duzgit 2006). Dengan proses reformasi pada sistem ekonomi sejak 2001 dan sistem politik sejak 2002, Turki mampu mengatasi sebagian besar hambatan dan memenuhi kriteria Uni Eropa pada aspek ekonomi dan politiknya (Bac dan Taskin 2007). Hingga akhirnya pada *Brussel Summit* 2004 diputuskan bahwa Uni Eropa akan memulai negosiasi dengan Turki. Negosiasi Turki dan Uni Eropa mulai dibuka pada 3 Oktober 2005.

Untuk dapat mencapai keanggotaan penuh, Turki harus melaksanakan 35 bab negosiasi yang memuat area-area kebijakan yang harus disepakati. Tetapi dalam perkembangannya, proses negosiasi aksesi Turki berjalan sangat lambat. Dari total 35 bab, baru 13 bab yang telah dibuka, dan delapan bab masih dibekukan dikarenakan sengketa Turki dengan Siprus (bbc.co.uk 2013). Kroasia yang juga memulai negosiasi aksesi pada tahun yang sama dengan Turki bahkan telah secara resmi memperoleh keanggotaan penuh pada 1 Juli 2013.

Stagnansi yang terjadi di dalam proses negosiasi mengakibatkan status keanggotaan Turki hingga kini tidak kunjung mencapai kepastian. Tidak dapat dihindari juga bahwa Turki masih memiliki sejumlah persoalan yang belum terselesaikan misalnya masalah hak asasi manusia dan konflik dengan Siprus. Persoalan tersebut juga merupakan alasan yang menjadi penghambat bergabungnya Turki ke Uni Eropa. Namun terlepas dari persoalan-persoalan tersebut, terhambatnya proses aksesi Turki juga turut dipengaruhi oleh sikap dari sejumlah Negara Anggota yang cenderung oposisi terhadap bergabungnya Turki ke dalam Uni Eropa. Turki dapat menyelesaikan negosiasi dalam 10-15 tahun, tetapi progres negosiasi menjadi sangat lambat dikarenakan Uni Eropa terbagi mengenai apakah Turki seharusnya bergabung atau tidak (bbc.co.uk 2013). Beberapa politisi yang oposisi bahkan secara eksplisit menyatakan penolakannya terhadap keanggotaan Turki di Uni Eropa. Sebagian besar sikap oposisi tersebut salah satunya dilatarbelakangi oleh faktor perbedaan kultur dan identitas. Dalam hal ini, Turki sebagai negara dengan populasi masyarakat dominan Muslim dinilai tidak memiliki kecocokan dengan kultur dan identitas Eropa yang memiliki sejarah Kristen.

Tulisan ini memfokuskan pada persoalan kultural dan identitas sebagai faktor yang menghambat proses aksesi Turki ke Uni Eropa. Tujuan dari tulisan ini untuk menganalisa indikasi terjadinya “*clash of civilisations*” dalam hubungan Turki dan Uni Eropa. Samuel Huntington di dalam tesisnya menyatakan bahwa pada era pasca Perang Dingin sumber konflik tidak lagi berasal dari persoalan ideologi atau ekonomi melainkan persoalan kultural. Konflik utama dalam politik global akan terjadi diantara bangsa atau kelompok dari peradaban-peradaban yang berbeda. *Clash of civilisations* (benturan peradaban) akan mendominasi politik global (Huntington 1993).

Uni Eropa, *Enlargement* dan Aksesi Turki

Pada tahun 1950, Menteri Luar Negeri Perancis Robert Schuman mengusulkan sebuah ide untuk membentuk kerjasama yang bertujuan menghindari perang diantara bangsa

Eropa. Gagasan Schuman ini dikenal dengan “*Schuman Plan*”. Visinya adalah untuk menciptakan sebuah institusi Eropa yang akan menampung dan mengelola produksi batu bara dan baja (europa.eu tt). Melalui Schuman Plan, enam negara menandatangani sebuah perjanjian untuk menjalankan industri batu bara dan baja di bawah satu pengelolaan yang sama. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tahun 1951 dan menghasilkan pembentukan *European Coal and Steel Community* (ECSC). Terbentuknya ECSC menjadi awal mula dari integrasi regional di Eropa.

Kesuksesan ECSC mendorong enam negara pendiri untuk mengembangkan kerjasama. Pada tahun 1957, negara ECSC menandatangani *Treaty of Rome*. Dari perjanjian tersebut, dibentuklah *European Economic Community* (EEC) dan *European Atomic Energy Community* (Euroatom). Melihat keberhasilan EEC, pada tahun 1971, Denmark, Irlandia dan Inggris mengajukan permohonan untuk bergabung dengan EEC. Ketiganya resmi bergabung dengan EEC pada 1973. Masuknya Denmark, Irlandia dan Inggris ke dalam EEC menandai *enlargement* (perluasan) pertama di regionalisme Eropa.

Perluasan merupakan salah satu agenda penting di Uni Eropa. Secara singkat, perluasan memiliki sejumlah keuntungan bagi Uni Eropa antara lain: (1) meningkatkan keamanan bagi seluruh masyarakatnya melalui perluasan zona perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di Eropa, (2) mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baik bagi negara anggota yang lama maupun yang baru, (3) mendatangkan kualitas hidup yang lebih baik bagi warga di seluruh Eropa karena anggota-anggota baru mengadopsi kebijakan Uni Eropa untuk perlindungan lingkungan dan perlawanan terhadap kriminalitas, obat-obatan dan imigrasi ilegal, dan (4) perluasan dapat memperkuat peran Uni Eropa di dunia – di kebijakan luar negeri dan keamanan, kebijakan perdagangan dan di bidang lainnya (Komisi Eropa 2001).

Treaty on the European Union menyatakan bahwa setiap negara Eropa dapat mengajukan permohonan keanggotaan apabila negara tersebut menghormati nilai-nilai demokrasi dan memiliki komitmen untuk memajukannya (ec.europa.eu tt). Berdasarkan Kriteria Kopenhagen, sebuah negara dapat bergabung dengan Uni Eropa apabila (1) secara politik, negara tersebut memiliki lembaga-lembaga yang stabil yang menjamin demokrasi, supremasi hukum dan hak asasi manusia; (2) secara ekonomi, negara tersebut memiliki perekonomian pasar yang berfungsi dan dapat mengatasi tekanan persaingan dan kekuatan pasar di dalam wilayah Uni Eropa; dan (3) secara hukum, negara tersebut menerima undang-undang dan praktik yang telah ditetapkan Uni Eropa, khususnya tujuan-tujuan utama tentang persatuan politik, ekonomi dan moneter (eeas.europa.eu tt).

Sejak tahun 1973, Uni Eropa telah melakukan tujuh kali perluasan. Hasilnya, kini Uni Eropa telah berhasil memperbesar keanggotaannya hingga mencapai 28 negara. Perluasan kelima merupakan yang terbesar dan terjadi pada tahun 2004 dengan bergabungnya 10 negara ke Uni Eropa. Selain enam negara pendiri, 22 negara yang telah bergabung ke dalam Uni Eropa antara lain: Denmark, Irlandia dan United Kingdom (1973); Yunani (1981); Portugal dan Spanyol (1986); Austria, Finlandia dan Swedia (1995); Republik Ceko, Siprus, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Slowakia dan Slovenia (2004); Bulgaria dan Rumania (2007); dan Kroasia (2013) (europe.eu tt). Proses akses suatu negara ke Uni Eropa meliputi sejumlah tahapan yaitu, (1) negara akan diberi prospek keanggotaan, (2) negara akan diberi status sebagai Negara Kandidat sebelum memulai proses negosiasi dan (3) ketika negosiasi dan reformasi telah terpenuhi, negara dapat bergabung dengan Uni Eropa.

Saat ini telah ada lima negara yang memperoleh status sebagai Negara Kandidat di Uni Eropa yaitu, Islandia, Republik Makedonia bekas Yugoslavia, Montenegro, Serbia dan Turki (eeas.europa.eu tt).

Di dalam agenda perluasan Uni Eropa, akses Turki mungkin merupakan isu yang paling kontroversial (Duzgit 2006). Diskusi mengenai akses Turki hingga kini masih menimbulkan perdebatan. Terhitung sudah 26 tahun sejak Turki mengajukan permohonan untuk menjadi anggota penuh pada 1987, hingga kini prospek keanggotaan Turki di Uni Eropa belum menemui kejelasan. Sejak tahun 2002, Turki telah mengeluarkan sejumlah “paket harmonisasi” sebagai bagian dari reformasi untuk memenuhi kriteria politik Kopenhagen. Reformasi ini menargetkan pada perundang-undangan yang tidak sesuai dengan standart Uni Eropa. Melalui paket harmonisasi tersebut Turki melakukan sejumlah amandemen pada sejumlah area seperti kebebasan berekspresi, kesetaraan gender, penghapusan hukuman mati dan sebagainya.

Pemerintah Turki mengklaim bahwa paket harmonisasi telah memberi dampak yang revolusioner bagi kehidupan di Turki diantaranya dengan memperbaiki hak asasi manusia, memperkuat perlindungan terhadap kekerasan, memperluas kebebasan berkespresi dan kebebasan media, mengembangkan hak-hak kultural, memperkuat kesetaraan gender dan mengkonsolidasikan demokrasi. Kementerian Luar Negeri Turki (2007) menyatakan bahwa melalui sejumlah paket harmonisasi tersebut, Turki saat ini telah menjadi lebih bebas, stabil dan bermartabat dibandingkan sebelum Desember 1999 –tahun ketika Turki ditetapkan sebagai negara kandidat oleh Uni Eropa. “Di bawah partai AKP Erdogan, ekonomi Turki telah menjadi yang terbesar ke-17 di dunia ... Sepuluh tahun kepemimpinan AKP juga telah membuat Turki lebih demokratis” (economist.com 2013). Tetapi, pada kenyataannya, perkembangan internal Turki yang progresif tersebut tidak sejalan dengan proses negosiasi akses yang bergerak lambat, bahkan cenderung mengalami stagnansi.

Pada Desember 2006, Uni Eropa memutuskan untuk menangguhkan pembicaraan akses dengan Turki di delapan area negosiasi. Keputusan tersebut menindaklanjuti penolakan Turki untuk membuka pelabuhan dan bandara udaranya bagi Siprus (bbc.co.uk 2007). Selama hampir delapan tahun proses negosiasi berjalan, hingga kini baru satu bab yang telah dinyatakan selesai yaitu bab 25 (*science and research*). Bahkan sejak 2010, pembicaraan akses Turki dibekukan tanpa adanya satu pun bab negosiasi yang dibuka. Pada Juni 2013, Uni Eropa sempat mengeluarkan rencana untuk membuka kembali negosiasi dengan Turki yang sempat terhenti. Namun rencana tersebut ditolak oleh Jerman dikarenakan oleh kasus kekerasan pemerintah Turki terhadap demonstran. Akibatnya, proses negosiasi Turki dengan Uni Eropa harus kembali ditunda.

Kompatibilitas Kultur dan Identitas antara Turki dan Uni Eropa

Turki telah memiliki sejarah dan kultur Islam yang sangat kuat. Sebelum pemerintahannya berubah menjadi sekular, Turki lebih dahulu dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman yang berbasis pada Islam dan telah berkuasa lebih dari enam abad. Runtuhnya kekuasaan Ottoman mengakibatkan perubahan pada sistem politik Turki. Pada 29 Oktober 1923 Majelis Kebangsaan Turki segera memproklamasikan sebuah negara republik dan melantik Mustafa Kemal Atatürk sebagai presiden pertama (republika.com 2013).

Secara geografis, hampir seluruh wilayah Turki berada di benua Asia sedangkan sisanya berada di benua Eropa. Meskipun memiliki dominasi Muslim, Turki mengklaim dirinya telah menjadi bagian dari Dunia Barat. Turki merupakan salah satu negara pendiri Persatuan Bangsa-bangsa, anggota NATO, OECD dan Dewan Eropa. Sejak akhir Perang Dunia II, Turki telah menjalin hubungan yang dekat dengan Eropa (Bac dan Taskin 2007), salah satunya dengan terlibat dalam integrasi regional di benua tersebut. Turki merupakan satu-satunya negara dengan masyarakat dominan Muslim yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Uni Eropa. Saat ini, Turki juga merupakan salah satu mitra perdagangan terbesar Uni Eropa.

Namun ditarik dari sejarahnya, hubungan antara Turki dan Eropa di masa lalu sendiri tidak dapat dihindarkan dari konflik. Terutama pada masa Kesultanan Ottoman, hubungan Turki dan Eropa memasuki fase kelam. Jatuhnya Konstantinopel yang mengakhiri Kekaisaran Bizantium memberi dampak yang sangat besar bagi Kristen Eropa (bbc.co.uk, 2009). Perkins (dalam Öner 2009) menyatakan bahwa bagi banyak orang Eropa, Kekaisaran Ottoman merepresentasikan aspek-aspek terburuk dari Islam. Sejarah ini yang kemudian banyak mempengaruhi pandangan Eropa terhadap Turki. Masa lalu Turki Ottoman masih membayangi hubungan Turki dengan Eropa saat ini (Bac dan Taskin 2007). Fritz Bolkestein, Komisaris Pasar Tunggal Uni Eropa, menyatakan, “Apabila Turki masuk ke Uni Eropa, hal tersebut sama artinya bahwa upaya pasukan Jerman, Austria, dan Polandia yang melawan pengepungan Vienna oleh Turki Ottoman pada 1683 akan menjadi sia-sia” (Bac dan Taskin 2007).

Berdirinya Republik Turki menandai berakhirnya sistem kekhalifahan. Ataturk menciptakan identitas baru bagi Turki dengan menjadikan Turki sebagai negara modern yang sekular. Ataturk tidak hanya menghapus ideologi Islam dari pemerintahan, tapi juga dari kehidupan masyarakat Turki. Di bawah kepemimpinannya, Ataturk melakukan sejumlah pelarangan bagi segala hal yang berhubungan dengan Islam seperti pelarangan pemakaian sorban, kopiah dan jilbab di area publik. Turki juga mengadopsi kalender Gregoria untuk menggantikan kalender tradisional Islam dan menjadikan hari Sabtu dan Minggu sebagai hari libur mengikuti aturan Eropa. Pada masa itu juga sempat diberlakukan larangan bagi adzan dalam bahasa Arab. Adzan ditulis ulang dalam bahasa Turki dan harus diterapkan oleh masjid-masjid di Turki.

Hingga kini, tradisi sekularisme Ataturk masih terus dianut oleh Turki. Tetapi, pandangan masyarakat terhadap sekularisme dan Islam di Turki sendiri juga masih terpecah. Sebagian masyarakat Turki yang mendukung ideologi Ataturk menilai bahwa Islam seharusnya tidak memiliki pengaruh pada kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Misalnya, pada 2007 lalu, para pendukung sekularisme melakukan demonstrasi di Ankara, tujuannya adalah untuk menekan Erdogan agar tidak maju dalam pemilihan presiden disebabkan oleh latar belakang Islamnya (bbc.co.uk 2012) dan pada 2008, ribuan masyarakat Turki melakukan protes terhadap rencana pemerintah untuk mengizinkan wanita menggunakan jilbab di universitas (Rainsford 2008). Sedangkan sebagian masyarakat lainnya menganggap bahwa Turki seharusnya kembali pada orientasi Islam sesuai dengan sejarahnya di masa lalu. Pendukung ideologi Islam di Turki juga memandang seharusnya pemerintah menjalin hubungan yang lebih dekat dengan dunia Muslim dibandingkan dengan Barat.

Sejak kepemimpinan AKP, beberapa kebijakan pemerintah Turki dianggap lebih cenderung bermuatan agama. Para kritikus menuduh pemerintah yang berakar kelompok Islamis memaksakan keyakinan mereka di negara tersebut (Jones 2013). Selain melakukan pencabutan larangan berjilbab, Turki juga memberlakukan

pembatasan terhadap konsumsi dan pembebanan pajak yang tinggi pada alkohol. Sejak Perdana Menteri Erdogan menjabat, tingkat pajak untuk alkohol melonjak dari yang terendah di dunia menjadi yang tertinggi, yaitu mencapai 100 persen (Jones 2013). Pemerintahan AKP membuat polaritas antara sekularisme dan Islam semakin besar. Dalam sejumlah kebijakan yang dibuat, beberapa diantaranya memicu kontroversi diantara dua kubu yakni, pendukung sekularisme dan Islam, salah satu contohnya adalah rencana proyek pembangunan di Taman Gezi yang memicu demonstrasi baru-baru ini. Rumelili (2009) mengutip pernyataan dalam pidato Erdogan di Konferensi Sun Valley tahun 2006:

"Turkey is the most successful Muslim country in putting together Islamic culture, democratic order, and the principles of secularism. Turkey not only proven false the idea that the [west and Islam] represent two incompatible worlds, but also provided an example for why these can't even be separated by definite lines."

Tetapi, pada kenyataannya, identitas sekularisme di Turki tidak diakui sepenuhnya di dalam pandangan Eropa. Meskipun Turki telah membangun struktur sekular, karena memiliki populasi dominan Muslim, Turki tidak dianggap sebagai negara yang benar-benar sekular oleh beberapa orang di Eropa (Öner 2009). Ditinjau dari sejarah relasinya di masa lalu, terlihat bahwa perbedaan kultur dan identitas telah menjadi akar konflik dari Turki dan Eropa. Dan hingga kini, dalam dinamika hubungan Turki dan Uni Eropa, perbedaan tersebut masih sangat banyak mempengaruhi. Terutama terkait dengan akses Turki ke Uni Eropa, diskusi mengenai kompatibilitas kultur dan identitas diantara kedua entitas masih terus memicu perdebatan. Populasi Muslim dan sejarah Islam Turki tetap dianggap sebagai suatu hal yang tidak memiliki kecocokan dengan Eropa.

Oposisi Negara-negara Anggota Uni Eropa terhadap Keanggotaan Turki

Dalam sejarah Uni Eropa, Turki merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim pertama yang melakukan negosiasi akses dengan Uni Eropa. Erdogan pada 2006 menyatakan:

"What do you gain by adding 99 percent Muslim Turkey to the European Union? You gain a bridge between the EU and the 1.5 billion-strong Islamic world. An alliance of civilisations will start."

(Dyer 2005)

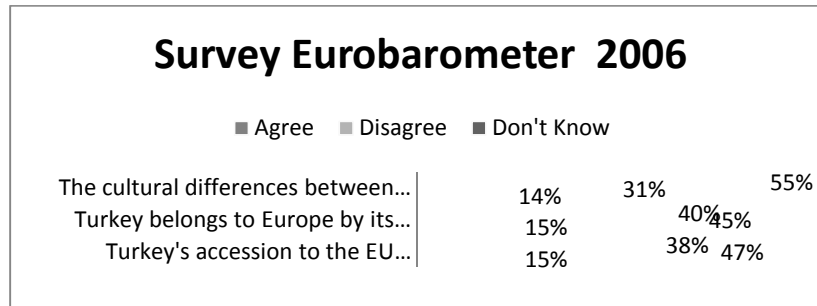
Pernyataan Erdogan tersebut menunjukkan keyakinan bahwa bergabungnya Turki ke dalam Uni Eropa merupakan langkah positif dalam membangun relasi dua kultur dan peradaban yang berbeda yakni, dunia Barat dan Islam. Namun optimisme Erdogan tersebut tampaknya berbanding terbalik dengan sikap Uni Eropa. Upaya Turki untuk memperoleh keanggotaan penuh mendapat tentangan dari sejumlah Negara Anggota. Hingga kini akses Turki masih menuai pro dan kontra di Uni Eropa. Turki memulai negosiasi pada tahun 2005, namun sebagian besar negosiasi terhenti dikarenakan ketidaksepakatan seputar pembagian Siprus dan tentangan yang kuat di beberapa negara anggota seperti Perancis, Jerman dan Austria (hurriyet.com tt). "Terdapat perdebatan yang terus terjadi diantara negara anggota mengenai apakah Turki secara kultur dan geografi sesuai dengan Uni Eropa ... Beberapa politisi khawatir bahwa negara Muslim seperti Turki akan mengubah keseluruhan karakter dari Uni Eropa" (bbc.co.uk 2002).

Nicholas Sarkozy dan Kanselir Jerman Angela Merkel termasuk ke dalam politisi yang paling oposisi terhadap bergabungnya Turki ke dalam Uni Eropa. Sarkozy mengutarakan bahwa “*If Turkey were Europe, We would know it*” (Satiroglu 2007). Sarkozy juga pernah menyatakan “... Eropa tanpa batas sama artinya dengan Eropa tanpa tujuan, tanpa identitas dan tanpa nilai” (hurriyet.com tt). Kata ‘batas’ dalam pernyataan Sarkozy tersebut memiliki kecenderungan merujuk pada perbedaan kultur dan identitas di antara Turki dan Uni Eropa. Angela Merkel merupakan salah satu yang mendukung Turki untuk memperoleh “*privileged partnership*” dibandingkan dengan “*full membership*”. Tetapi Turki menolak status *privileged partnership* tersebut. Bagaimanapun juga, tidak memberi status sebagai anggota penuh, sama artinya dengan tidak mengakui Turki sebagai bagian dari Uni Eropa.

Selain Sarkozy dan Merkel, sejumlah politisi lain juga turut menunjukkan penolakan terhadap eksistensi Turki sebagai bagian dari Uni Eropa. Mantan Presiden Perancis Valerie Giscard d’Estaing pernah menyatakan bahwa Turki bukanlah negara Eropa dan bergabungnya Turki ke Uni Eropa akan menjadi akhir dari Eropa. Menurut Giscard d’Estaing, orang-orang yang mendukung akses Turki merupakan lawan dari Uni Eropa (bbc.co.uk 2009). Fritz Bolkestein memperingatkan bahwa peradaban Kristen Eropa beresiko diserbu oleh Islam apabila 70 juta Muslim diijinkan bergabung dengan Uni Eropa (Duzgit 2006). Sementara itu, Jose Manuel Barroso, Ketua Komisi Eropa, pada 2007 menyatakan, “Turki tidak siap menjadi anggota Uni Eropa dan Uni Eropa tidak siap menerima Turki sebagai anggota. Tidak besok dan tidak juga selanjutnya” (Satiroglu 2007).

Ketidakberpihakan sejumlah negara Uni Eropa terhadap bergabungnya Turki setidaknya memberi gambaran mengenai prospek keanggotaan Turki di masa depan. Perluasan Uni Eropa dimungkinkan terjadi apabila disetujui (1) oleh *voting* Dewan dengan suara bulat, (2) oleh Parlemen Eropa dengan *absolute majority* dan (3) oleh Negara-negara Anggota (Parliament of Georgia, tt). Adanya tentangan dari Perancis dan Jerman yang notabene merupakan negara-negara berpengaruh di Uni Eropa tentu saja berpotensi besar menjadi penghalang akses Turki. Belum lagi ditambah dengan oposisi-oposisi lainnya yang menentang keanggotaan Turki di Uni Eropa. Tidak hanya dari elit politik, akses Turki juga cenderung mendapat penolakan dari warga Uni Eropa. Menurut Special Eurobarometer 255 (2006), sebesar 49 persen responden menyatakan penolakannya terhadap keanggotaan Turki di Uni Eropa, sedangkan yang mendukung hanya sebesar 38 persen. Dari 25 negara anggota Uni Eropa pada saat itu, akses Turki meraih persentase oposisi yang lebih besar dibandingkan dengan persentase dukungan di 15 negara. Austria menjadi negara dengan persentase oposisi tertinggi yakni mencapai 81 persen.

Berikut ini merupakan grafik hasil survey Eurobarometer yang menunjukkan persentase respon warga Uni Eropa terkait dengan Turki:



Diolah dari Bac, Meltem Muftuler dan Evrim Taskin. 2007. "Turkey's Accession to The European Union: Does Culture and Identity Play a Role?" (berdasarkan Special Eurobarometer 2006)

Upaya Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa masih harus terganjal oleh penolakan dari sejumlah Negara Anggota. Sebagian besar penolakan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa perluasan yang mencakup Turki dapat menjadi bahaya yang berakibat fatal pada hilangnya identitas Eropa. Sehingga disini dapat disimpulkan bahwa perbedaan kultur dan identitas antara Turki dan Eropa merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada terhambatnya akses Turki. *The notions of cultural difference and identity were also a major theme in heated discussions on the prospects of Turkish accession to the Union* (Duzgit 2006).

Dengan demikian, optimisme "*alliance of civilisation*" Erdogan tampaknya akan sulit terealisasi sebab keputusan status keanggotaan Turki pada akhirnya harus ditentukan oleh para Negara Anggota. Sebaliknya, dibandingkan dengan *alliance of civilisation*, kondisi hubungan antara Uni Eropa dan Turki justru memiliki kecenderungan mengarah pada "*clash of civilisations*". Hal ini didasarkan pada fakta bahwa telah terjadi persoalan kultural yang saling bersinggungan di dalam relasi Uni Eropa dan Turki. Bagi pendukung keanggotaan Turki, bergabungnya Turki dianggap dapat menjadi jembatan yang menghubungkan Dunia Barat dan Islam dan menunjukkan kompatibilitas diantara keduanya. Sedangkan bagi penentangannya, Turki tidak dapat menjadi anggota Uni Eropa dikarenakan Turki bukan merupakan bagian dari peradaban Eropa (Öner 2009).

Clash of Civilisations: Hubungan Uni Eropa dan Turki

Di dalam tesisnya, Samuel Huntington menjelaskan fase-fase dari evolusi konflik. Pada fase pertama, konflik di dunia Barat umumnya terjadi diantara para raja. Kekaisaran, monarki absolut dan monarki konstitusional berupaya untuk memperluas birokrasi, persenjataan, kekuatan ekonomi merkantil dan wilayah yang mereka perintah. Fase kedua, pecahnya Revolusi Perancis membuat evolusi konflik bergeser. Seiring dengan mulai berdirinya negara-negara bangsa, konflik beralih dari antar raja menjadi antar bangsa. Dan fase ketiga, setelah Revolusi Rusia, konflik yang dominan adalah konflik antar ideologi, pertama antara komunisme, fasisme-Nazisme dan demokrasi liberal, dan kemudian antara komunisme dan demokrasi liberal. Selama Perang Dingin, konflik yang terjadi lebih didominasi oleh konflik ideologi diantara dua superpower pada masa itu yakni, Amerika Serikat (AS) dengan demokrasi liberalnya dan Uni Soviet dengan komunisme.

Huntington berpendapat bahwa pembagian negara-negara menjadi Dunia Pertama, Kedua, dan Ketiga tidak lagi relevan. Menurut Huntington, setelah Perang Dingin berakhir, pengelompokan negara tidak lagi didasarkan pada sistem politik atau

ekonomi atau tingkat pembangunan ekonomi melainkan kultur dan peradaban. Huntington mendefinisikan peradaban sebagai suatu entitas kultural. “Peradaban adalah pengelompokan budaya tertinggi dari sekelompok orang dan tingkat terluas dari identitas budaya yang dimiliki oleh orang-orang yang membedakan manusia dari makhluk lain. Peradaban didefinisikan baik oleh elemen objek bersama, seperti bahasa, sejarah, agama, adat, institusi, maupun oleh identifikasi diri masyarakat yang subyektif” (Huntington 1993). Huntington menyatakan bahwa konflik antar peradaban akan menjadi fase terbaru dari evolusi konflik di dunia modern.

Selain itu, Huntington juga mengidentifikasi enam atau delapan peradaban yang interaksinya akan membentuk dunia di masa depan. Peradaban-peradaban tersebut antara lain: peradaban Barat, Konfusian, Jepang, Islam, Hindu, *Slavic-Orthodox*, Amerika Latin dan kemungkinan Afrika. “Peradaban dibedakan dari satu sama lainnya oleh sejarah, bahasa, budaya, tradisi dan, yang paling penting, agama ... Perbedaan diantara peradaban sifatnya jauh lebih fundamental dibandingkan perbedaan ideologi dan rezim politik” (Huntington 1993).

Huntington menyatakan bahwa dari tiga fase evolusi konflik yang telah terjadi sebelumnya, konflik sebagian besar terjadi di dalam peradaban Barat. Menurut Huntington, berakhirnya Perang Dingin mengakibatkan perubahan pada peta kekuatan dengan hilangnya satu oponent *superpower* dan hal tersebut mengakibatkan kemungkinan konflik militer diantara negara-negara Barat menjadi semakin kecil. Huntington membagi dunia menjadi “*the West and the Rest*” (Öner 2009) dan menyatakan bahwa negara-negara non-Barat akan memberikan respon terhadap kekuatan dan nilai-nilai Barat melalui satu atau kombinasi dari tiga alternatif yaitu, (1) melakukan isolasi dari penetrasi Barat, (2) melakukan upaya untuk bergabung dengan Barat, dan (3) melakukan perimbangan terhadap kekuatan Barat.

Sejak dideklarasikan sebagai negara Republik pada tahun 1923, Turki lebih condong mendekat ke Barat. Turki mulai menerapkan sekularisme dan mengadopsi Eropa sebagai model identitasnya yang baru. Turki juga bergabung dengan aliansi-aliansi Barat salah satunya Uni Eropa.

“Menurut laporan *Turkish Foundation for Political, Economic and Social Research* (SETA) pada 2010, hanya 33,2 persen masyarakat Turki yang memiliki ‘persepsi positif terhadap Arab’, sedangkan 33,9 persen memiliki ‘persepsi negatif’ ... Eropa mendapat nilai yang lebih tinggi daripada negara-negara Arab, dengan 36,6 responden (masyarakat Turki) menyatakan pendapat positif mereka terhadap Eropa dan 35 persen yang menyatakan pandangan negatifnya”.

(Hussein 2013)

Laporan SETA tersebut menunjukkan bahwa Turki memiliki persepsi positif yang lebih besar terhadap Eropa dibandingkan terhadap Arab. Padahal, berdasarkan laporan *Turkish Economic and Social Studies Foundation* (TESEV) pada 2012, Turki justru memperoleh opini positif sebesar 69 persen dari responden di Timur Tengah. Tetapi, sementara Turki memiliki persepsi positif terhadap Eropa, survey Eurobarometer menunjukkan fakta lain. Menurut hasil *polling* Standart Eurobarometer (2005), Turki merupakan negara yang paling tidak diinginkan untuk menjadi anggota Uni Eropa di masa depan. Persentase penolakan warga Uni Eropa terhadap keanggotaan Turki mencapai 55 persen dan jumlah ini merupakan yang terbesar diantara 15 negara lainnya di dalam daftar jajak pendapat Eurobarometer (Standart Eurobaromete 2005).

“Turkey is often represented as a country of contradictions; one that is geographically situated both in Europe and in Asia, where a predominantly

Islamic society coexists with a staunchly secular westernizing state, founded on the rejection of its Ottoman and Islamic heritage".

(Rumelili 2008)

Sejak runtuhnya kekaisaran Ottoman, Turki mulai menjadikan Barat sebagai model identitas negaranya. Huntington merepresentasikan Turki sebagai negara "*torn*". Para pemimpin negara *torn* berupaya untuk menjadikan negaranya sebagai bagian dari Barat, meskipun secara sejarah, budaya dan tradisi, negara mereka merupakan non-Barat. "*The most obvious and prototypical torn country is Turkey ... Historically Turkey has been the most profoundly torn country*" (Huntington 1993).

Untuk mendefinisikan ulang identitas peradabannya, negara *torn* harus memenuhi tiga persyaratan antara lain:

"First, its political and economic elite has to be generally supportive of and enthusiastic about this move. Second, its public has to be willing to acquiesce in this redefinition. Third, the dominant group in the recipient civilization have to be willing to embrace the convert".

(Huntington 1993)

Dalam kasus Turki, Huntington menilai bahwa dua persyaratan pertama sebagian besar terpenuhi. Elit Turki biasanya mendefinisikan Turki sebagai bagian dari masyarakat Barat dan opini publik Turki secara umum mendukung keanggotaan Uni Eropa, tetapi beberapa elit politik di Uni Eropa tidak melihat Turki sebagai bagian dari Eropa (Öner 2009). Menurut Huntington, sementara elit Turki telah mendefinisikan Turki sebagai masyarakat Barat, elit Barat justru menolak untuk menerima Turki sebagai bagian dari mereka. Hal tersebut dapat terlihat dari sikap sejumlah politisi Uni Eropa yang secara jelas menunjukkan penolakannya terhadap perbedaan kultur dan identitas Turki sebagai negara Muslim. Disamping itu, lambatnya proses akses juga membuat dukungan masyarakat Turki pada keanggotaan Turki di Uni Eropa cenderung menurun drastis, "... turun dari sekitar 70 persen ketika negosiasi dimulai pada tahun 2005 ke 33 persen" (economist.com 2013).

Selain itu, Huntington juga menyatakan bahwa terdapat tingkatan yang menunjukkan hambatan bagi negara non-Barat dalam bergabung dengan Barat. Masyarakat Islam, Konfusian, Hindu dan Budha dinilai sebagai yang akan menghadapi hambatan terbesar. Sedangkan bagi negara-negara Amerika Latin dan Eropa Timur, hambatan yang dihadapi akan jauh lebih kecil dibandingkan empat peradaban sebelumnya. Dengan demikian, sementara sebagian besar negara di Eropa Timur telah berhasil bergabung dalam perluasan Uni Eropa, Turki masih harus menghadapi hambatan yang sangat besar untuk bergabung dengan Barat. Huntington menyatakan bahwa perbedaan kultural juga sifatnya lebih tetap atau lebih sulit diubah dibandingkan dengan perbedaan ideologi. Menurut Huntington, di dalam konflik antar ideologi, masih terdapat peluang untuk memilih atau mengubah keberpihakan sisi ideologi. Tetapi tidak demikian di dalam konflik antar peradaban, identifikasi diri menjadi suatu hal yang *given* dan tidak dapat diubah dan terutama oleh perbedaan agama, pembagian menjadi lebih tajam dibandingkan dengan etnisitas.

Eropa merupakan kawasan geografis yang memberi kelahiran bagi konstruksi suatu peradaban tertentu (Bac dan Taskin 2006). Sebelum terintegrasi seperti saat ini, Eropa telah lebih dahulu melewati banyak fase konfliktual, terpecah oleh berbagai sejarah perang hingga akhirnya kembali disatukan oleh kesadaran akan perdamaian. Disamping tujuan ekonomi, Uni Eropa pada awalnya juga dibentuk atas dasar keinginan kolektif untuk mewujudkan keamanan kawasan. Dari ECSC hingga Uni

Eropa, regionalisme di Eropa tidak hanya berkembang sebagai entitas politik melainkan juga suatu kawasan yang masyarakatnya saling berbagi nilai, kultur dan sejarah yang menguatkan identitas peradabannya.

“Being European does not only refer to living in a particular region of the world-i.e. Europe-but also refers to sharing and practicing of a common history, norms, traditions and values ... The members of the EU share a common understanding of the past along with a common heritage”.

(Bac dan Taskin 2006)

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Huntington bahwa regionalisme ekonomi hanya akan sukses apabila dibentuk oleh peradaban yang sama dan Uni Eropa merupakan regionalisme yang didasarkan pada fondasi kultur Eropa dan Kristen Barat. Sedangkan Turki merupakan negara dengan masyarakat dominan muslim. Secara geografis dan historis, Turki lebih lekat dengan kultur Islam dibandingkan dengan Barat. Hal tersebut memungkinkan dapat menjadi penghambat bagi Turki untuk bergabung ke dalam Uni Eropa. Identitas Islam Turki masih diidentifikasi sebagai sumber perbedaan yang memberi alasan bagi eksklusi Turki dari Uni Eropa (Öner 2009). Dari sudut pandang Uni Eropa, identitas Turki masih dianggap sebagai hal yang berbeda, sebagai “other” dari Eropa. Girard (dalam Öner 2009) menyatakan bahwa Islam bukan hanya merupakan sebuah agama, tetapi juga sebuah budaya, sebuah peradaban serta sebuah identitas dan identitas ini akan menjadi suatu hal yang asing bagi Kristen Eropa.

Meskipun tidak pernah dinyatakan secara resmi bahwa identitas Turki menjadi faktor yang menghambat akses Turki ke Uni Eropa, sikap oposisi sejumlah politisi dan sebagian besar warga Uni Eropa setidaknya mampu merepresentasikan indikasi dan kecenderungan terjadinya kondisi yang disebut oleh Huntington di dalam tesisnya sebagai *clash of civilisations*. *It is more or less spoken or more or less hidden, but the major component in popular rejection of Turkey's admission is Islam* (Ford 2004).

“Turki tidak akan menjadi anggota Komunitas Eropa, dan alasannya nyata, sebagaimana yang Presiden Ozal katakan, “karena kami (Turki) Muslim dan mereka (Uni Eropa) Kristen dan mereka tidak mengatakannya.”

(Huntington 1993)

Kesimpulan

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terhambatnya proses akses Turki ke Uni Eropa. Disamping persoalan internal dan hubungan luar negerinya, faktor perbedaan kultur dan identitas termasuk yang berpengaruh terhadap prospek keanggotaan Turki. Sebagai negara dengan populasi masyarakat dominan muslim dan memiliki akar sejarah Islam, Turki dianggap tidak memiliki kecocokan dengan kultur Eropa yang lebih didominasi oleh Kristen.

Di dalam tesisnya, Samuel Huntington berpendapat bahwa persoalan kultural akan menjadi sumber konflik yang dominan di dalam politik global. Perbedaan peradaban akan sangat rentan memicu terjadinya konflik. Bila hal tersebut terjadi, maka akan muncul suatu kondisi yang disebut Huntington sebagai *clash of civilisations*. Tulisan ini menganalisa indikasi terjadinya *clash of civilisations* tersebut di dalam hubungan Turki dan Uni Eropa.

Turki dan Eropa dinilai sebagai dua entitas yang berbeda. Sekalipun Turki berupaya mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari Dunia Barat, hal tersebut tidak pernah diakui oleh Barat (Eropa). Prospek keanggotaan Turki di Uni Eropa sangat tergantung pada seluruh Negara Anggota. Sehingga, sekalipun Turki terus menunjukkan progres reformasi yang signifikan, selama Uni Eropa masih memandang kultur dan identitas Turki sebagai hal yang berbeda dari Eropa, maka prospek keanggotaan Turki di Uni Eropa akan sangat sulit menemukan titik terang.

Daftar Pustaka

US Energy Information Administration, 2010. "Country Analysis Brief-India" [online]. dalam <http://www.eia.doe.gov/cabs/India/Full.html> [diakses 22 Oktober 2010].

Artikel Online

Akgun, Mensur dan Sabiha S.G. 2012. "The Perception of Turkey in the Middle East 2012" [online]. dalam www.tesev.org.tr/Upload/.../Perceptions2012.pdf [diakses Juli 2013].

Bac, M.M. dan Evrim Taskin. 2007. "Turkey's Accession to The European Union: Does Culture and Identity Play a Role?" [online]. dalam dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/16/.../13229.pdf [diakses 27 Juli 2013].

Duzgit, Senem. 2006. "Seeking Kant in the EU's Relations with Turkey" [online]. dalam mercury.ethz.ch/.../2006_5+Seeking+kant++EU+... [diakses 28 Juni 2013].

Dyer, Gwyne. 2005. "Turkey, Europe and the Clash of Civilizations" [online]. dalam <http://www.commongroundnews.org/article.php?id=1127&lan=en&sp=0> [diakses pada 28 Juni 2013].

Erdem, Erdinç dan Çağrı Yıldırım. 2012. "Turkey's Fifteenth EU Progress Report: On the Road to Guinness, rather than to Europe?" [online]. dalam <http://www.balkananalysis.com/turkey/2012/12/29/turkeys-fifteenth-eu-progress-report-on-the-road-to-guinness-rather-than-europe/> [diakses Agustus 2013].

European Commission. 2001. "Enlargement of the European Union: An Historic Opportunity" [online]. dalam ec.europa.eu/enlargement/..pdf/..corpus_en.pdf [diakses Juni 2013].

Ford, Peter. 2004. "Wariness over Turkey's EU bid" [online]. dalam <http://www.csmonitor.com/2004/1006/p06s02-woeu.html> [diakses Agustus 2013].

Jones, Dorian. 2013. "Agenda Islami Dipersalahkan Atas Larangan Alkohol di Turki" [online]. dalam <http://www.voaindonesia.com/content/agenda-islami-dipersalahkan-atas-larangan-alkohol-di-turki/1671125.html> [diakses Agustus 2013].

Huntington, Samuel P. 1993. "Clash of Civilizations?" [online]. dalam www.hks.harvard.edu/fs/.../Huntington_Clash.pdf [diakses 19 Juli 2013].

Hussein, Ahmed Abou. 2013. "One-sided love affair? The reality of Arab-Turkish sentiments" [online]. dalam <http://www.todayszaman.com/news-317987-one->

- sided-love-affair-the-reality-of-arab-turkish-sentimentsby-ahmed-abou-hussein-.html [diakses Juli 2013].
- Oner, Selcen. 2009. "Turkey's Membership to the EU in Terms of 'Clash of Civilization'" [online]. dalam libris.bahcesehir.edu.tr/dosyalar/A.../AEO096.pdf [diakses 28 Juni 2013].
- Parliament of Georgia. Tt. "History of the European Union".
- Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs Secretariat General for EU Affairs. 2007. "Political Reforms in Turkey" [online]. dalam www.abgs.gov.tr/files/pub/prt.pdf [diakses Agustus 2013].
- Rainsford, Sarah. 2008. "Turks Protest Over Headscarf Plan" [online]. dalam <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7224314.stm> [diakses Juni 2013].
- Rumelili, Bahar. 2008. "Negotiating Europe: EU-Turkey Relations from an Identity Perspective" [online]. dalam http://file.insightturkey.com/Files/Pdf/insight_turkey_vol_10_no_1_2008_rumelili.pdf [diakses 28 Juni 2013].
- Satiroglu, Handan T. 2007. "The European Union Still Eludes a Turkey Culturally Apart" [online]. dalam <http://www.worldpoliticsreview.com/articles/1075/the-european-union-still-eludes-a-turkey-culturally-apart> [diakses Juni 2013].
- Special Eurobarometer 255. 2006. "Attitude towards European Union Enlargement" [online]. dalam ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_255_en.pdf [diakses Juli 2013].
- Standard Eurobarometer 64. 2005. "Public Opinion in the European Union" [online]. dalam ec.europa.eu/public.../eb/.../eb64_cytcc_exec.pdf [diakses Juli 2013].
- . 2002. "Turkey entry 'would destroy EU'" [online]. dalam <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2420697.stm> [diakses juni 2013].
- . 2009. "Ottoman Empire (1301-1922)" [online]. dalam http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/history/ottomanempire_1.shtml [diakses Juni 2013].
- . 2012. "Turkey Timeline" [online]. dalam http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/1023189.stm [diakses 27 Juli 2013].
- . 2013. "EU enlargement: The next seven" [online]. dalam <http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11283616> [diakses 27 Juli 2013].
- . 2009. "German, French leaders emphasize opposition to Turkey joining EU" [online]. dalam <http://www.hurriyet.com.tr/english/world/11621541.asp> [diakses 28 Juni 2013].
- . 2013. "TIMELINE: Turkey's long and winding road towards EU" [online]. dalam <http://www.reuters.com/article/2009/01/18/us-turkey-eu-accession-timeline-idUSTRE5oHoR320090118> [diakses 27 Juli 2013].
- . 2011. "How Atatürk Made Turkey Secular" [online]. dalam <http://lostislamichistory.com/how-ataturk-made-turkey-secular/> [diakses Juni 2013].

- . 2013. "Turkey and the European Union: A tiny thaw?" [online]. dalam <http://www.economist.com/news/europe/21572244-many-turks-have-given-up-progress-towards-eu-inches-forward-tiny-thaw> [diakses 2 Agustus 2013].
- . Tt. "A peaceful Europe – the beginnings of cooperation" [online]. dalam http://europa.eu/about-eu/eu-history/1945-1959/index_en.htm [diakses 2 Agustus 2013].
- . Tt. "Enlargement" [online]. dalam http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/index_en.htm [diakses pada Juli 2013].